

**PELATIHAN TEKNIS PENGELOLAAN BISNIS DAN MANAJEMEN WIRAUSAHA
DALAM RANGKA KEGIATAN PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA
PEMBANGUNAN INDUSTRI DI KABUPATEN SITUBONDO**

Vita Novianti¹⁾ Sri Ayu Nur Hartatik²⁾

^{1,2}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Email: vitanovianti@unars.ac.id

Abstrak Perencanaan pembangunan ekonomi daerah harus memperhatikan faktor sumber daya atau potensi yang dimiliki dengan memberdayakan pelaku usaha. Peran pemerintah daerah tercermin dalam pendayagunaan kemampuan mengelola sektor publik, terutama dalam mengembangkan kegiatan ekonomi yang tidak hanya mampu menciptakan nilai tambah yang besar tetapi juga mampu menyerap tenaga kerja yang banyak, seperti kegiatan pengembangan komoditi unggulan. Pariwisata merupakan salah satu aspek pembangunan industri yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dikarenakan terbukanya peluang dan kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar kawasan wisata Aktivitas ekonomi di kawasan wisata Pasir Putih Kabupaten Situbondo terdiri dari beberapa pengrajin yang pada umumnya menggunakan hasil laut sebagai bahan baku. Dalam skala kecil, diversifikasi usaha dilakukan pada jenis usaha lainnya, seperti kerajinan rajut, kayu dan kaca. Aktivitas produksi dilakukan pengrajin bergantung pada banyaknya pesanan yang diterima, selain itu produksi skala kecil untuk disimpan sebagai stok. Produksi tersebut dijual di kios kawasan wisata Pasir Putih dan juga dirumah masing-masing pengrajin. Tujuan pemasaran selain kawasan Pasir Putih dan sentra produksi lokal di Kabupaten Situbondo juga di luar kota seperti Bali, Papua, Jember, Surabaya, Jakarta, Jepara, Lamongan Kalimantan, Sulawesi, Makssar, Jogyakarta dan Batam. Diversifikasi usaha dilakukan beberapa pengrajin sehingga produk bisa dipasarkan di luar negeri, antara lain Brazil, Malaysia, Eropa, China, Aljazair, Turki, Rusia dan India. Program pemberdayaan dan pengembangan sudah dilakukan, baik pemerintah maupun CSR perusahaan dan perguruan tinggi. Hanya saja program tersebut belum bersifat menyeluruh dan berkesinambungan. *Ooutput* atau luaran dari kegiatan berupa perumusan konsep penyelesaian berupa rencana tindaklanjut yang akan dilakukan pihak pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo dengan pelaku usaha.

Kata Kunci: Pembangunan Industri, Evaluasi, Perencanaan

**TECHNICAL TRAINING ON BUSINESS MANAGEMENT AND
ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT IN THE FRAMEWORK OF PREPARING
AND EVALUATING INDUSTRIAL DEVELOPMENT PLANS
IN SITUBONDO REGENCY**

Abstract Regional economic development planning must pay attention to the factors of resources or potential owned by empowering business actors. The role of local governments is reflected in the utilization of the ability to manage the public sector, especially in developing economic activities that are not only able to create great added value but also able to absorb a large number of workers, such as superior commodity development activities. Economic activity in the Pasir Putih tourist area of Situbondo Regency consists of several craftsmen who generally use seafood as raw materials. On a small scale, business diversification is carried out in other types of businesses, such as knitting crafts, wood and glass. Production activities carried out by craftsmen depend on the number of orders received, in addition to small-scale production to be stored as stock. The production is sold at the kiosk of the Pasir Putih tourist area and also at the homes of each craftsman. Marketing destinations in addition to the Pasir Putih area and local production centers in Situbondo Regency are also outside cities such as Bali, Papua, Jember, Surabaya, Jakarta, Jepara, Lamongan Kalimantan, Sulawesi, Makassar, Jogyakarta and Batam. Business diversification is carried out by several craftsmen so that products can be marketed abroad, including Brazil, Malaysia, Europe, China, Algeria, Turkey, Russia and India. Empowerment and development programs have been carried out, both government and CSR companies and universities. It's just that the program is not yet comprehensive and continuous. Output or output from activities in the form of formulation of a settlement concept in the form of a follow-up plan that will be carried out by the local government, in this case the Situbondo Regency Cooperatives, Industry and Trade Office with business actors.

Keywords: Industrial Development, Evaluation, Planning

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka melakukan perubahan yang mengandung makna adanya kemajuan/perbaikan, pertumbuhan untuk mencapai kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Aspek pembangunan meliputi sosial, budaya, ekonomi, dan politik sampai pada perkembangan adanya penyelarasan dengan konservasi lingkungan. Perencanaan Pembangunan Daerah secara umum merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai *stakeholder* pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu.

Pariwisata merupakan salah satu aspek pembangunan industri yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dikarenakan terbukanya peluang dan kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar kawasan wisata. Kawasan wisata merupakan salah satu industri yang secara langsung dapat memberi peluang kepada masyarakat setempat untuk memperoleh berbagai manfaat dengan cara menawarkan barang atau jasa yang lazim pula disebut produk wisata (Suwena dan Widyatmatja, 2010:134). Salah satu potensi dan obyek wisata di Kabupaten Situbondo adalah kawasan wisata Pasir Putih di Desa Pasir Putih, Kecamatan Bungatan. Produk wisata yang paling banyak diminati oleh para wisatawan yang berkunjung adalah kerajinan kerang. Selain itu, berbagai macam jenis produksi lainnya dari beberapa pelaku usaha. Industri yang dipasarkan di kawasan wisata Pasir Putih adalah industri di bidang kerajinan kerang, kayu, rajut, kaca, minuman herbal dan kerajinan batok (kulit kelapa).

METODE

Kegiatan dilaksanakan di Aula Wisma Rengganis Kabupaten Situbondo pada tanggal 4-7 September 2023. Tujuan dari kegiatan ini untuk penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri di Kabupaten Situbondo. Peserta yang terlibat dalam kegiatan ini terdiri dari 100 orang pelaku usaha dari berbagai kerajinan yang ada di Kabupaten Situbondo. Pelatihan terbagi menjadi dua ruangan dengan masing-masing jumlah peserta 50 orang. Sumber pendanaan berasal dari APBN melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-fisik Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun Anggaran 2023. Narasumber dari kegiatan ini akademisi dari Universitas Jember dan Universitas

Abdurachman Saleh Situbondo serta pelaku usaha dari Kabupaten Kediri. Metode kegiatan ini adalah identifikasi permasalahan dan penjelasan narasumber dari akademisi dan praktisi dengan *output* atau luaran dari kegiatan berupa perumusan konsep penyelesaian berupa rencana tindaklanjut yang akan dilakukan pihak pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo dengan pelaku usaha.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL ANALISIS

Kegiatan awal yang kami lakukan adalah mengidentifikasi aktivitas ekonomi dan permasalahan dari masing-masing pengrajin di kawasan wisata Pasir Putih Kabupaten Situbondo. Terdapat delapan jenis usaha pelaku ekonomi dari berbagai jenis usaha, antara lain: kerajinan kerang, kerajinan rajut, minuman herbal, kerajinan kayu, kerajinan kaca, kerajinan batok (kulit kelapa) dan kerajinan piring dan mangkok bekas. Dari berbagai jenis usaha tersebut menghasilkan berbagai macam produk dengan omset pertahun yang bervariasi, mulai dari 1 juta sampai 60 juta pertahun. Perekutan tenaga kerja masih secara kekerabatan, baik dari keluarga atau kerabat dekat pemilik usaha. Jumlah tenaga kerja berkisar dua sampai empat orang atau tergantung jumlah pemesanan produk. Tenaga kerja tersebut mengerjakan tugasnya di rumah mereka masing-masing tidak di lokasi pemilik usaha.

Aktivitas ekonomi yang dilakukan para pengrajin adalah memproduksi dan mendistribusikan berbagai kerajinan. Aktivitas produksi dilakukan pengrajin bergantung pada banyaknya pesanan yang diterima, selain itu produksi skala kecil untuk disimpan sebagai stok. Produksi tersebut dijual di kios kawasan wisata Pasir Putih dan juga dirumah masing-masing pengrajin. Tujuan pemasaran selain kawasan Pasir Putih dan setra produksi lokal di Kabupaten Situbondo juga di luar kota seperti Bali, Papua, Jember, Surabaya, Jakarta, Jepara, Lamongan Kalimantan, Sulawesi, Makssar, Jogyakarta dan Batam. Diversifikasi usaha dilakukan beberapa pengrajin sehingga produk bisa dipasarkan di luar negeri, antara lain Brazil, Malaysia, Eropa, China, Aljazair, Turki, Rusia dan India.

Permasalahan yang dihadapi pelaku usaha adalah (1) keterbatasan akses terhadap sumber-sumber pembiayaan dari lembaga-lembaga keuangan formal khususnya dari perbankan (2) kurangnya pembinaan, bimbingan manajemen, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (3) kebijakan pemerintah yang belum berpihak (4) kemampuan

penguasaan teknologi yang masih kurang dan (5) keterbatasan fasilitas pemasaran seperti pengangutan, promosi, dan sarana informasi.

PEMBAHASAN

Perencanaan pembangunan ekonomi daerah harus memperhatikan faktor sumber daya atau potensi yang dimiliki dengan memberdayakan pelaku usaha. Dengan demikian, pembangunan ekonomi suatu daerah dapat berkembang signifikan dan efektif. Peran pemerintah daerah tercermin dalam pendayagunaan kemampuan mengelola sektor publik, terutama dalam mengembangkan kegiatan ekonomi yang tidak hanya mampu menciptakan nilai tambah yang besar tetapi juga mampu menyerap tenaga kerja yang banyak, seperti kegiatan pengembangan komoditi unggulan.

Aktivitas ekonomi di kawasan wisata Pasir Putih Kabupaten Situbondo terdiri dari beberapa pengrajin yang pada umumnya menggunakan hasil laut sebagai bahan baku. Dalam skala kecil, diversifikasi usaha dilakukan pada jenis usaha lainnya, seperti kerajinan rajut, kayu dan kaca. Perkembangan ekonomi Kabupaten Situbondo belum banyak menyentuh sektor UMKM. Program pemberdayaan dan pengembangan sudah banyak dilakukan, baik pemerintah maupun CSR perusahaan dan perguruan tinggi. Hanya saja program tersebut belum bersifat menyeluruh dan berkesinambungan. Sehingga dalam pengembangannya, pelaku usaha banyak mengalami hambatan baik yang berasal dari dalam maupun dari luar.

Pelaku usaha atau UMKM memiliki kendala, baik untuk mendapatkan pembiayaan maupun untuk mengembangkan usahanya. Dari sisi pembiayaan, masih banyak pelaku usaha yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses kredit dari bank atau lembaga keuangan lainnya, baik karena kendala teknis ataupun non teknis. Misalnya, tidak mempunyai/tidak cukup agunan dan keterbatasan akses informasi ke perbankan sebagai contoh kendala nonteknis, Dari sisi pengembangan usaha, pelaku usaha masih memiliki keterbatasan informasi mengenai pola pembiayaan untuk komoditas tertentu. Sedangkan dari sisi perbankan, membutuhkan informasi tentang komoditas yang potensial untuk dibiayai.

Kurangnya pembinaan, bimbingan manajemen, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu hambatan berkembangnya unit usaha. Penguatan kemampuan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan melalui berbagai cara, salah satunya memberikan pelatihan-pelatihan, baik pelatihan yang berkaitan dengan manajemen, pemasaran, maupun dalam hal inovasi produk. Pelatihan akan pelaku usaha dengan berbagai

keterampilan dan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi usahanya. Pelatihan dalam hal manajemen dapat dikaitkan dengan bagaimana mengelola usaha dengan baik, bagaimana membuat perencanaan usaha, dan hal-hal lainnya berkaitan dengan manajemen. Pelatihan dalam hal pemasaran dapat dikaitkan dengan bagaimana memasarkan produk, dalam hal ini sekarang *trend* pemasaran melalui internet (*web*, media sosial). Dalam konteks permasalahan ini dibutuhkan peran pemerintah daerah dalam upaya peningkatan sumber daya manusia melalui program pelatihan dan pendampingan yang berkesinambungan.

Hambatan terbesar adalah kebijakan pemerintah daerah yang belum berpihak kepada pelaku usaha di Kabupaten Situbondo. Belum terbangunnya sinergitas kebijakan antar perangkat daerah untuk pengembangan pelaku usaha. Kompleksitas kebijakan yang dimaksud kebijakan dalam penyelenggaran pelatihan yang dilakukan oleh dinas terkait di Pemerintahan Daerah untuk mendukung pengembangan pelaku usaha, kebijakan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang mengajukan izin pendirian lembaga keuangan, dan menetapkan regulasi kemudahaan dalam mengajukan pembiayaan usaha serta kebijakan yang berkaitan dengan pemberian perizinan, badan hukum, dan hak paten (haki/hak atas kekayaan intelektual) melalui penetapan perundang-undangan atau peraturan.

Pemasaran produk menjadi kurang optimal dengan kemampuan penguasaan teknologi yang masih rendah. Bagaimana usaha dapat terus beroperasi dan terus semakin berkembang melalui banyaknya pesanan (order) atas produk yang dihasilkan. Keterbatasan kemampuan teknologi berdampak terhadap rendahnya inovasi dari produk, misalnya *branding* dan pengemasannya. Sehingga produk tidak mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.

Pemberian fasilitas pemasaran dalam bentuk kemudahan fasilitas pemasaran seperti pengangkutan, promosi, dan sarana informasi akan memberikan dampak yang besar bagi penyerapan produk. Selama ini produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha belum sepenuhnya terserap atau belum banyak diketahui oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena kemampuan pelaku usaha dalam memasarkan produknya masih rendah. Keterlibatan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo masih terbatas dalam memfasilitasi pemasaran produk.

KESIMPULAN

Pelaku usaha atau UMKM mempunyai peranan yang besar bagi perekonomian di Kabupaten Situbondo. Peranan tersebut dalam bentuk tingginya kontribusi bagi pembentukan produk domestik bruto (PDB/GDP), penyerapan tenaga kerja, penyedia lapangan kerja, dan kontribusinya yang besar dalam mengurangi pengangguran masyarakat. Namun sampai saat ini pelaku usaha berbagai kerajinan di Pasir Putih Kecamatan Bungatan masih menghadapi berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut diantaranya kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, iklim investasi dan iklim usaha yang kurang kondusif, kurangnya bimbingan dan pembinaan dari pihak terkait, teknologi yang rendah, sumber daya modal yang sedikit, manajemen yang masih tradisional, infrastruktur yang tidak memadai, terbatasnya akses memperoleh ijin usaha atau badan hukum, keterbatasan memasarkan produk yang dihasilkan, dan masalah lainnya. Dibutuhkan keberpihakan pemerintah daerah dengan cara membuat kebijakan yang memihak kepada pelaku usaha atau UMKM. Strategi dan kebijakan yang tepat, komprehensif dan berkelanjutan dapat berbentuk:

1. Strategi penguatan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif
2. Strategi penguatan kemampuan wirausahawan
3. Strategi penguatan sektor keuangan untuk pembiayaan
4. Strategi kemudahan dalam pemberian perizinan, badan hukum, dan hak paten (HAKI/hak atas kekayaan intelektual)
5. Strategi pemberian fasilitas pemasaran, dan
6. Strategi pemberian pelatihan, pendampingan dan bimbingan

Dibutuhkan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo melalui kebijakan dan strategi dengan diikuti langkah nyata pemerintah dan dunia usaha serta semangat untuk maju bagi pelaku usaha dan UMKM. Demi terwujudnya peningkatan perekonomian masyarakat di Kabupaten Situbondo.

Sebagai saran dalam kegiatan ini, ditujukan kepada perguruan tinggi sebagai komponen masyarakat untuk melakukan upaya konkrit melalui kegiatan pengabdian berikutnya kepada pelaku usaha yang ada di Kabupaten Situbondo. Program edukasi dan pendampingan terhadap masyarakat atau pelaku usaha dapat dilakukan melalui penelitian dan pengabdian sebagai wujud dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.



Gambar 1. Foto bersama narasumber dan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo



Gambar 2. Foto bersama Peserta Pelatihan

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih disampaikan kepada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo yang telah memberi kesempatan untuk menjadi narasumber pada Pelatihan Teknis Pengelolaan Bisnis dan Manajemen Wirausaha Dalam Rangka Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri di Kabupaten Situbondo. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui pengabdian dosen kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2022;
Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026;
Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026